

Nono Sampono, Anggota DPD-RI 2014 - 2019, Dapil Provinsi Maluku

Saatnya Indonesia Kembali Kepada Pancasila

Reformasi 1998 telah berlangsung 17 tahun, namun banyak persoalan yang belum terjawab, bahkan persoalan saat ini banyak hal terjadi yang bertolak belakang dengan tujuan reformasi. Mahatma Ghandi menyatakan ada tujuh dosa sosial sebagai ancaman bagi sebuah negara, yaitu: Politik tanpa prinsip, kekayaan tanpa kerja keras, perniagaan tanpa moralitas, kesenangan tanpa nurani, pendidikan tanpa karakter, sains tanpa humanitas, dan peribadatan tanpa pengorbanan. Kondisi bangsa Indonesia saat ini menggambarkan kekhawatiran Mahatma Ghandi tersebut, oleh karena itu "Bila keadaan carut marut dalam kehidupan bangsa, maka kita harus kembali ke rumah bersama yaitu "Pancasila" (Frangky Sihaletua).

Momentum peringatan 28 Oktober tahun ini, sebaiknya tidak sekedar acara rutin dan seremonial sebagai hari Sumpah Pemuda. Tapi harus menjadi refleksi untuk kembali kepada jati diri bangsa dan nilai-nilai luhur Pancasila yang sudah luntur di tengah kehidupan masyarakat.

Sumpah Pemuda 1928, adalah sebuah pernyataan kontrak politik berbagai suku bangsa dan daerah untuk menyatuh sebagai sebuah bangsa dan tanah air Indonesia yang memiliki bahasa persatuan.

"Peringatan hari Sumpah Pemuda harus menjadi refleksi untuk kembali ke jati diri bangsa dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila maka segala permasalahan dan perbedaan yang terjadi bisa diselesaikan," katanya.

Danpaspampres di era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri itu membandingkan, saat ini mirip yang dialami Uni Soviet, yaitu hilangnya nilai-nilai kebangsaan dan bisa terlihat dari meningkatnya angka tindak pidana korupsi yang menjerat para pejabat negara.

"Kita perlu obat 'demokrasi' untuk Reformasi aspek politik setelah Orde Baru, tapi tidak diminum over dosis, sehingga bukannya menjadi sehat melainkan menjadi racun yang berbahaya. Begitu juga dengan demokrasi di Indonesia," tandasnya.

Negara sedang memang perlu sistem demokrasi, tapi demokrasi yang bernafaskan Pancasila. Sebab, dipastikan demokrasi liberal seperti yang diterapkan di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa tidak cocok dengan kepribadian dan jati diri bangsa.

"Pancasila bukan produk ideologi yang kaku dan mati, melainkan bernilai universal bagi berbagai perbedahan faham dan golongan serta mampu menembus ruang waktu sehingga dapat dijadikan mitra dialog terhadap berbagai permasalahan dalam implementasinya untuk mengelola berbagai kepentingan bangsa dan negara, " katanya.

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia terdiri dari banyak suku, agama dan ras. Di satu sisi merupakan anugrah dengan kekayaan alam yang sangat melimpah. Sementara di lain sisi merupakan ancaman untuk kelangsungan kebhinekaan yang bisa menjurus ke arah disintegrasi bangsa. Bahkan, seorang guru besar Stefanie Newton dari Universitas California, AS merasa heran dengan Indonesia yang beraneka ragam tersebut dan berpotensi disintegrasi atau terpecah belah, tapi hingga saat ini masih kokoh dan rahasianya tentu terletak pada nilai - nilai ideologi Pancasila tersebut.

"Walau bagaimanapun banyaknya masalah terjadi, tapi seluruh komponen bangsa harus tetap optimis akan masa depan bangsa, kesejahteraan serta kejayaan Indonesia harus tetap diperjuangkan bersama." Tandasnya

"Alhamdulillah kita masih memiliki Pancasila sebagai alat pemersatu diberbagai aspek dan tatanan kehidupan masyarakat. Jadi, jangan coba-coba merubah dengan ideologi lain yang tidak sesuai dengan kepribadian dan jati diri bangsa, " terang Jenderal bintang tiga itu.